

PENGUMUMAN DAFTAR ANTREAN

LOKET PELAYANAN PENGADILAN PAJAK TANGGAL 10 JUNI 2021

Hal - hal yang perlu diperhatikan:

1. Tidak disediakan lahan parkir untuk pengunjung, lahan digunakan untuk ruang tunggu tambahan.
2. Kendaraan dapat *drop off* penumpang di area yang ditentukan.
3. Petugas Satuan Pengamanan akan memberikan nomor urut sesuai waktu kedatangan pemohon.
4. Tunjukkan kartu identitas kepada petugas Satuan Pengamanan.
5. Tunjukkan bukti terdaftar di daftar antrean (dapat berupa tangkapan layar pengumuman ini).
6. Bagi pendaftar yang tidak mendapatkan kuota antrean *online* dan tidak mendapat konfirmasi balasan, dimohon untuk mengirimkan e-mail pertanyaan melalui alamat e-mail berikut ini: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
7. Untuk ketentuan lain dapat dilihat di Surat Edaran Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor SE-01/SP/2020.
8. Pendaftar wajib mengikuti Jam Kedatangan sesuai dengan yang dituliskan pada pengumuman ini.
9. Sesuai SE-01/PP/2021, pengajuan banding/gugatan dan penyampaian dokumen persidangan dan surat-surat lainnya kecuali permohonan Peninjauan Kembali, diimbau untuk dilakukan melalui pos/ekspedisi tercatat.

LOKET A (PENGAJUAN BANDING/GUGATAN)

No.	Nama	Hari & Tanggal	Loket	Waktu
1	PT Bukit Indah Sukses	Kamis, 10 Juni 2021	A	10.00 - 12.00 WIB
2	PT Bukit Makmur Mandiri Utama	Kamis, 10 Juni 2021	A	10.00 - 12.00 WIB
3	BUT JFE Engineering Corporation	Kamis, 10 Juni 2021	A	10.00 - 12.00 WIB
4	PT Megah Asri Busana Internasional	Kamis, 10 Juni 2021	A	10.00 - 12.00 WIB
5	PT YKK Zipper Indonesia	Kamis, 10 Juni 2021	A	10.00 - 12.00 WIB

LOKET B (PERMOHONAN IKH/SKSP)

No.	Nama	Hari & Tanggal	Loket	Waktu
1	Teddy T. Suryoprabowo	Kamis, 10 Juni 2021	B	10.00 - 11.00 WIB
2	Zahidah	Kamis, 10 Juni 2021	B	10.00 - 11.00 WIB
3	Sindian Budi Siswojo	Kamis, 10 Juni 2021	B	10.00 - 11.00 WIB
4	Windriaty	Kamis, 10 Juni 2021	B	10.00 - 11.00 WIB

LOKET C (PENINJAUAN KEMBALI DAN KONTRA MEMORI PK)

No.	Nama	Hari & Tanggal	Loket	Waktu
1	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Kamis, 10 Juni 2021	C	10.00 - 12.00 WIB

Penting:

Sehubungan dengan instruksi dari Pemerintah Pusat terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Pengadilan Pajak berkomitmen untuk menetapkan pembatasan pelaksanaan layanan administrasi secara tatap muka.